

### Determinan *Financial Distress* Pemerintah Daerah di Indonesia

Aliffia Dewi Syahda<sup>1</sup>, dan Fajar Syaiful Akbar<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

*Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.*



#### ARTICLE HISTORY

Received: 05 May 26

Final Revision: 15 May 26

Accepted: 20 May 26

Online Publication: 30 June 26

#### KEYWORDS

Financial Distress, Local Governments, Financial Independence, Expenditure Efficiency, Solvency

#### KATA KUNCI

*Financial Distress*, Pemerintah Daerah, Kemandirian Keuangan, Efisiensi Belanja, Solvabilitas

#### CORRESPONDING AUTHOR

fajarsa.ak@upnjatim.ac.id

#### DOI

10.37034/jems.v8i3.464

#### A B S T R A C T

The study aims to analyze the factors influencing financial distress in provincial governments in Indonesia, with a focus on financial independence, expenditure efficiency, and solvency. This research employs a quantitative approach using panel data from provincial governments in Indonesia for the period 2021–2024. Panel data regression is used as the main analytical tool, with the fixed effect model selected based on the results of the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test. The findings indicate that financial independence is associated with a decrease in the level of financial distress, while expenditure efficiency and solvency are associated with an increase in financial pressure. These results suggest that the internal capacity of local governments to generate revenue and manage financial obligations plays a crucial role in maintaining fiscal stability. This study emphasizes the importance of improving the quality of regional expenditure and strengthening fiscal capacity to reduce financial pressure on local governments.

#### A B S T R A K

Penelitian ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *financial distress* pada pemerintah provinsi di Indonesia dengan menitikberatkan pada kemandirian keuangan, efisiensi belanja, dan solvabilitas. Penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif dengan data panel pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2024. Model regresi data panel dijadikan instrumen analisis utama dalam penelitian ini, dengan pendekatan *fixed effect model* yang ditetapkan melalui hasil uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berkaitan dengan penurunan tingkat *financial distress*, sedangkan efisiensi belanja dan solvabilitas berkaitan dengan peningkatan tekanan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas internal daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola kewajiban keuangan berperan dalam menjaga stabilitas fiskal. Penelitian ini menekankan peningkatan kualitas belanja daerah serta penguatan kapasitas fiskal untuk mengurangi tekanan keuangan pemerintah daerah.

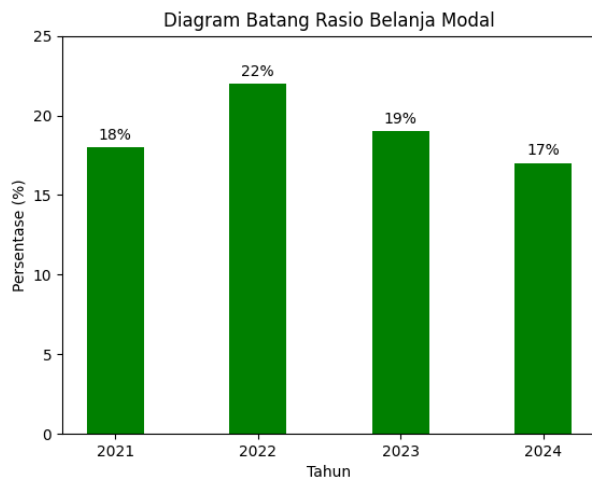
#### 1. Pendahuluan

Pemerintah daerah berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prinsip otonomi daerah [1]. Pelaksanaan fungsi tersebut menuntut pengelolaan keuangan yang berkelanjutan guna mendukung kesejahteraan masyarakat [2]. Pengelolaan keuangan tercermin melalui laporan keuangan tahunan sebagai representasi kondisi fiskal [3]. Informasi yang disajikan menunjukkan kapasitas pengelolaan pendapatan, belanja, serta kesinambungan pembangunan. Struktur belanja menjadi indikator dalam menilai arah kebijakan anggaran terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi [4].

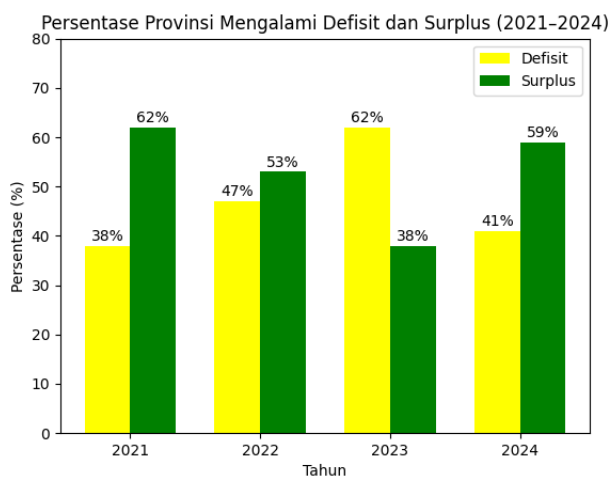
Reformasi pengelolaan keuangan daerah ditegaskan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 147 ayat (3) menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% serta minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40%. Kebijakan tersebut mencerminkan upaya pemerintah mendorong belanja produktif dan

mengurangi dominasi belanja konsumtif. Arah kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan dampak ekonomi jangka panjang bagi daerah [5].

Kerangka regulasi tersebut belum sepenuhnya tercermin pada komposisi belanja daerah. Data statistik keuangan pemerintah provinsi periode 2021–2024 memperlihatkan fluktuasi proporsi belanja modal dengan kecenderungan menurun. Pola tersebut mengindikasikan inkonsistensi alokasi anggaran bagi kegiatan produktif yang berdampak jangka panjang. Grafik Persentase Belanja Modal yang disajikan pada Gambar 1. Ketidakefisienan struktur belanja turut berimplikasi pada tekanan terhadap keseimbangan fiskal daerah. Kinerja fiskal daerah menunjukkan peningkatan jumlah provinsi yang mengalami defisit anggaran. Kondisi tersebut menandakan tekanan fiskal yang cukup tinggi pada sebagian besar daerah terutama tahun 2023 serta berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal daerah. Persentase Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 1. Grafik Persentase Belanja Modal



Gambar 2. Persentase Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi

Sejumlah pemerintah provinsi menunjukkan kondisi defisit anggaran yang signifikan dengan karakteristik permasalahan fiskal yang beragam. Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat defisit akibat ketidakseimbangan pendapatan dan belanja serta tekanan likuiditas [6]. Provinsi Lampung mengalami defisit yang dipengaruhi keterbatasan penerimaan, kewajiban tunda bayar, serta dana bagi hasil [7]. Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi defisit 80,18% dari anggaran akibat ketergantungan pada transfer pusat dan realisasi pendapatan yang tidak optimal [8]. Provinsi Riau mencatat defisit yang berkaitan dengan keterlambatan penyaluran dana bagi hasil sehingga mengganggu kelancaran belanja [9].

Tekanan fiskal yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi berkembang menjadi kondisi *financial distress* pada sektor publik. *Financial distress* mencerminkan kesulitan menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja serta penurunan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Karakteristik sektor publik tidak mengenal mekanisme kepailitan sehingga kondisi tersebut lebih mencerminkan melemahnya solvabilitas, meningkatnya ketergantungan, serta keterbatasan ruang belanja produktif [10].

Kebangkrutan administratif terjadi saat pemerintah daerah tidak mampu secara berkelanjutan memenuhi kewajiban [11].

Kemandirian keuangan menjadi indikator penting terkait kondisi *financial distress*. Kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan daerah membiayai belanja melalui pendapatan asli daerah [5]. Rendahnya tingkat kemandirian mencerminkan kapasitas fiskal terbatas, sehingga ruang fleksibilitas anggaran menjadi sempit ketika terjadi penurunan transfer atau target pendapatan tidak tercapai. Kondisi tersebut berpotensi memicu tekanan fiskal [12].

Efisiensi belanja mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran dalam menghasilkan manfaat optimal. Efisiensi menunjukkan kemampuan penggunaan sumber daya keuangan secara tepat guna [13]. Tingkat efisiensi yang rendah mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya produktif, karena sebagian belanja masih terserap pada kegiatan rutin yang minim nilai tambah. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian program pembangunan serta memperlemah kinerja keuangan daerah.

Solvabilitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat solvabilitas yang menurun mencerminkan keterbatasan kapasitas dalam menutup kewajiban fiskal [14]. Kondisi tersebut meningkatkan kerentanan keuangan daerah terhadap tekanan fiskal. Dampaknya berupa keterbatasan kemampuan menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan [15]. Hubungan indikator keuangan dengan *financial distress* dijelaskan melalui teori agensi. Teori ini menyoroti hubungan antara masyarakat dan pemerintah pusat sebagai prinsipal serta pemerintah daerah sebagai agen [16]. Asimetri informasi serta perbedaan kepentingan dapat menimbulkan inefisiensi pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut meningkatkan risiko *financial distress* serta melemahkan keberlanjutan fiskal [17].

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait determinan *financial distress* pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menemukan pengaruh rasio pertumbuhan, derajat desentralisasi, serta kompleksitas keuangan [18]. Penelitian berbeda menunjukkan pengaruh rasio efektivitas serta efisiensi [19]. Penelitian terkait lainnya menemukan pengaruh negatif signifikan *budgetary solvency ratio* terhadap *financial distress* [20].

Perbedaan temuan tersebut menunjukkan inkonsistensi hasil empiris antar penelitian. Cakupan wilayah penelitian masih terbatas pada daerah tertentu sehingga generalisasi menjadi terbatas. Variasi periode penelitian turut memengaruhi kebijakan fiskal yang dianalisis. Kondisi ini membuka peluang penelitian lanjutan dengan cakupan nasional serta variabel yang lebih komprehensif. Uraian tersebut mengarahkan penelitian

pada pengujian pengaruh kemandirian keuangan, efisiensi belanja, serta solvabilitas terhadap *financial distress* pemerintah provinsi periode 2021-2024. Fokus penelitian diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi fiskal daerah. Analisis tersebut juga mengidentifikasi akar permasalahan keuangan daerah. Hasil diharapkan memberikan implikasi terhadap keberlanjutan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2024. Populasi penelitian mencakup 34 pemerintah provinsi, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus sehingga seluruh entitas dijadikan unit analisis. Variabel dependen *financial distress* diukur menggunakan rasio perbandingan antara belanja modal dan total belanja daerah. Kemandirian keuangan diproksikan melalui rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Efisiensi belanja diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan daerah. Solvabilitas diukur menggunakan selisih antara pendapatan daerah dan dana alokasi khusus yang kemudian dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Operasionalisasi variabel penelitian merujuk pada sumber [5] dengan perumusan Financial Distress pada Persamaan (1), Kemandirian Keuangan pada Persamaan (2), Efisiensi Belanja pada Persamaan (3), dan Solvabilitas pada Persamaan (4).

$$\text{Financial Distress} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \quad (1)$$

$$\text{Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \quad (2)$$

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \quad (3)$$

$$\text{Efisiensi Belanja} = \frac{(\text{Pendapatan Daerah} - \text{Dana Alokasi Khusus})}{(\text{Belanja Daerah} - \text{Belanja Modal})} \quad (4)$$

Pendekatan analisis menggunakan regresi data panel yang mengombinasikan dimensi waktu (*time series*) dan antar entitas (*cross-section*) sehingga mampu memberikan estimasi yang lebih komprehensif. Pemilihan model dilakukan melalui uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier*, dengan mengacu pada nilai probabilitas dari masing-masing pengujian untuk menentukan model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak *Econometric Views (EViews)* karena dinilai mampu mengelola data panel secara efisien, menyediakan berbagai pilihan model estimasi yang relevan, serta menghasilkan output yang sistematis sehingga mempermudah interpretasi hasil penelitian.

**3. Hasil dan Pembahasan**

**3.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian dari masing-masing variabel. Ringkasan hasil pengolahan data disajikan pada Tabel 1. Statistik ini memberikan gambaran awal mengenai distribusi dan tingkat sebaran data antar unit observasi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev
FDT	0,05	0,32	0,15	0,06
KM	0,07	0,74	0,42	0,15
EF	0,48	1,35	1,00	0,09
SOL	0,68	2,70	1,01	0,20

Variabel *financial distress* (FDT) menunjukkan nilai terendah 0,05 dan tertinggi 0,32. Rata-rata nilai tercatat 0,15 dengan standar deviasi 0,06. Rentang nilai yang cukup lebar disertai penyebaran data yang moderat mengindikasikan heterogenitas tingkat tekanan keuangan antar pemerintah provinsi selama periode pengamatan. Variabel kemandirian keuangan (KM) memiliki nilai terendah 0,07 dan tertinggi sebesar 0,74. Rata-rata nilai sebesar 0,42 dengan standar deviasi sebesar 0,15. Perbedaan nilai minimum dan maksimum yang mencolok mencerminkan variasi kapasitas fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan keuangannya secara mandiri.

Variabel efisiensi belanja (EF) memiliki nilai terendah sebesar 0,48 dan tertinggi sebesar 1,35. Rata-rata nilai sebesar 1,00 dengan standar deviasi sebesar 0,09. Rentang nilai yang tidak terlalu lebar dengan deviasi yang relatif kecil mencerminkan konsistensi realisasi belanja terhadap perencanaan anggaran pada sebagian besar daerah. Variabel solvabilitas (SOL) menunjukkan kisaran nilai antara 0,68 sebagai batas paling rendah dan 2,70 sebagai batas paling tinggi. Rata-rata nilai tercatat sebesar 1,01 dengan standar deviasi sebesar 0,20. Variasi angka yang relatif besar tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan antardaerah dalam menanggung serta menyelesaikan kewajiban finansialnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan keuangan daerah belum merata.

**3.2. Uji Asumsi Klasik**

**3.2.1 Uji Normalitas**

Pengujian normalitas bertujuan memastikan bahwa sebaran data pada model regresi mengikuti pola distribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan uji *Jarque-Bera* dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Normalitas

Nilai <i>Jarque-Bera</i>	Probabilitas	Kesimpulan
2,07	0,35	Normal

Nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa data residual

tidak menyimpang dari distribusi normal. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa asumsi normalitas dalam model regresi terpenuhi. Distribusi residual yang mendekati normal mencerminkan pola sebaran data yang relatif simetris di sekitar nilai rata-rata.

### 3.2.2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya keterkaitan linear di antara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan matriks korelasi dengan kriteria nilai korelasi sebesar 0,85 sebagai batas terjadinya multikolinearitas. Hasil pengujian Uji Multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

	$X_1$	$X_2$	$X_3$
$X_1$	1,000	-0,198	-0,037
$X_2$	-0,198	1,000	-0,559
$X_3$	-0,037	-0,559	1,000

Nilai korelasi antar variabel independen berada di kisaran -0,198 hingga -0,559 untuk pasangan  $X_1$  dengan  $X_2$  dan  $X_2$  dengan  $X_3$ . Seluruh nilai korelasi tidak melampaui batas 0,85 sehingga tidak menunjukkan adanya hubungan linear yang berlebihan antar variabel independen. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat hubungan yang rendah hingga sedang sehingga model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami permasalahan multikolinearitas.

### 3.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Analisis heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabilitas kesalahan dalam model regresi bersifat tetap atau berubah setiap pengamatan. Metode *Glejser* digunakan dalam penelitian ini dengan melihat nilai probabilitas pada masing-masing variabel. Hasil pengujian Uji Heteroskedastisitas tersebut disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas
C	0,03	0,57	0,56
KM	-0,07	-0,98	0,32
EF	-0,10	-0,84	0,39
SOL	-0,07	-0,73	0,46

Seluruh variabel bebas menunjukkan nilai probabilitas yang melampaui ambang signifikansi sebesar 0,05. Variabel kemandirian keuangan memiliki probabilitas sebesar 0,32, efisiensi belanja sebesar 0,39, dan solvabilitas sebesar 0,46. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan nilai absolut residual. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa varians residual dalam model cenderung konstan pada setiap tingkat variabel independen. Kondisi ini mencerminkan pola penyebaran residual yang relatif stabil dan tidak membentuk pola tertentu. Model regresi terbebas dari indikasi ketidaksamaan varians residual.

### 3.2.4 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan menilai apakah residual antar periode pengamatan saling berkaitan dalam model regresi. Metode *Durbin-Watson* digunakan dengan mengacu pada nilai statistik yang dihasilkan. Hasil pengujian Uji Autokorelasi yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Nilai $dL$	Nilai $dU$	Nilai $d$	Kesimpulan
1,675	1,765	2,31	Bebas autokorelasi

Nilai *Durbin-Watson* ( $d$ ) sebesar 2,31 dibandingkan dengan batas bawah ( $dL = 1,675$ ) dan batas atas ( $dU = 1,765$ ) menunjukkan bahwa nilai  $d$  berada di atas  $dU$  dan masih berada dalam rentang menuju  $4 - dU$  ( $\approx 2,235$ ). Kondisi ini mengindikasikan bahwa model tidak mengalami autokorelasi. Residual antar periode bersifat independen dan model regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi.

## 3.3. Analisis Regresi Data Panel dan Uji Hipotesis

### 3.3.1. Robustness Check

Pengujian *robustness* diterapkan guna memastikan pemilihan model regresi data panel yang paling tepat dan konsisten untuk digunakan dalam penelitian. Pengujian dilakukan melalui beberapa uji dengan mempertimbangkan nilai probabilitas masing-masing pengujian. Hasil pengujian *Robustness Check* yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. *Robustness Check*

Uji	Probabilitas	Rekomendasi
<i>Chow</i>	0,00	<i>Fixed model</i>
<i>Hausman</i>	0,00	<i>Fixed model</i>
<i>Lagrange Multiplier</i>	0,00	<i>Random model</i>

Hasil uji *Chow* merepresentasikan probabilitas sebesar 0,00 berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Model *fixed effect* lebih sesuai dibandingkan *common effect*. Temuan ini mencerminkan adanya heterogenitas antar unit *cross-section* yang perlu diperhitungkan dalam model. Pengujian *Hausman* menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,00 yang berada di bawah ambang signifikansi 0,05. Pendekatan *fixed effect* dipilih dibandingkan *random effect*. Temuan ini menunjukkan bahwa model efek tetap lebih tepat dalam merepresentasikan variasi data dibandingkan model efek acak.

Pengujian *Lagrange Multiplier* menghasilkan nilai probabilitas 0,00 yang berada di bawah ambang 0,05. Pendekatan *random effect* dinilai lebih sesuai dibanding *common effect*. Hasil ini menunjukkan adanya efek individual dalam model data panel. Sintesis dari ketiga pengujian mengarah pada pemilihan pendekatan *fixed effect*. Secara konsisten lebih unggul dalam uji *Chow* dan *Hausman*. Hal ini menunjukkan bahwa model tersebut lebih efektif dalam mengakomodasi perbedaan karakteristik tiap unit *cross-section*.

## 3.3.2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *financial distress*. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai koefisien dan probabilitas pada model regresi data panel. Hasil pengujian Uji Hipotesis yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Pengaruh
C	-0,47	0,00	-
KM	-0,30	0,00	Berpengaruh
EF	0,50	0,00	Berpengaruh
SOL	0,25	0,00	Berpengaruh

Nilai signifikansi variabel kemandirian keuangan (KM) tercatat sebesar 0,00. Nilai tersebut berada di bawah ambang 0,05, sehingga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Arah koefisien menunjukkan hubungan negatif antara kemandirian keuangan dan *financial distress*. Nilai signifikansi variabel efisiensi belanja (EF) sebesar 0,00. Nilai probabilitas tersebut di bawah ambang signifikansi 0,05. Variabel efisiensi belanja berpengaruh terhadap *financial distress*. Arah koefisien menunjukkan hubungan positif antara efisiensi belanja dan *financial distress*.

Nilai signifikansi variabel solvabilitas (SOL) sebesar 0,00. Nilai probabilitas tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Variabel solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Nilai koefisien menunjukkan arah hubungan positif antara solvabilitas dan *financial distress*. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada hasil estimasi dengan pendekatan *fixed effect model*. Persamaan regresi disusun berdasarkan nilai koefisien yang diperoleh dari hasil pengujian terhadap variabel independen. Bentuk persamaan regresi yang dihasilkan yang disajikan pada Persamaan (5).

$Financial\ Distress_{i,t}$

$$= 0,47 + 0,30KM_{i,t} + 0,50EF_{i,t} + 0,25SOL_{i,t} + e \quad (5)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar -0,47 merupakan nilai *financial distress* ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Koefisien kemandirian keuangan sebesar -0,30 menunjukkan perubahan *financial distress* akibat perubahan satu satuan pada variabel tersebut dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien efisiensi belanja dan solvabilitas masing-masing sebesar 0,50 dan 0,25 menunjukkan besaran perubahan *financial distress* yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen.

## 3.4. Pembahasan

3.4.1. Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah

Hasil penelitian merepresentasikan kemandirian keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian keuangan diikuti oleh penurunan tingkat *financial distress*. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam mengandalkan pendapatan asli daerah berperan dalam menekan tekanan fiskal. Fenomena empiris di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa daerah masih menghadapi tekanan fiskal akibat keterbatasan sumber pendapatan internal. Kondisi defisit yang terjadi di sejumlah pemerintah daerah mencerminkan ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja serta rendahnya kapasitas fiskal daerah [21]. Keterbatasan tersebut mempersempit ruang fiskal dan meningkatkan risiko terjadinya *financial distress* secara berkelanjutan.

Kemandirian keuangan secara konseptual mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya melalui sumber internal tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat. Tingkat kemandirian yang rendah menunjukkan kapasitas fiskal yang terbatas serta fleksibilitas anggaran yang sempit [22]. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap tekanan keuangan dan memperbesar kemungkinan terjadinya *financial distress*. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal dapat memperbesar asimetri informasi serta inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidakseimbangan antara kepentingan prinsipal dan agen berpotensi mendorong penggunaan sumber daya yang tidak optimal sehingga meningkatkan risiko tekanan fiskal [16]. Kondisi tersebut memperkuat hubungan antara rendahnya kemandirian keuangan dengan meningkatnya *financial distress*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah terbukti mampu memperkuat stabilitas fiskal serta menurunkan risiko tekanan keuangan [23], [24], [25]. Perbedaan hasil pada beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik daerah dan periode pengamatan yang berbeda [26].

3.4.2. Pengaruh Efisiensi Belanja terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan nilai efisiensi belanja diikuti oleh peningkatan tingkat *financial distress*. Nilai

probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang kuat dalam model. Fenomena empiris di Indonesia menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sering kali difokuskan pada penyerapan anggaran yang tinggi. Pola belanja yang berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas *output* masih ditemukan di berbagai pemerintah daerah [21]. Kondisi ini mencerminkan adanya tekanan untuk menghabiskan anggaran yang tersedia dalam satu periode.

Efisiensi belanja secara konseptual menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Nilai efisiensi yang tinggi tidak selalu mencerminkan penggunaan anggaran yang optimal apabila tidak diikuti dengan kualitas belanja yang baik [27]. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara penyerapan anggaran dan hasil yang dicapai. Temuan penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa efisiensi seharusnya menurunkan risiko *financial distress* [16]. Peningkatan efisiensi yang diukur dari sisi penyerapan anggaran dapat mencerminkan perilaku oportunistik dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi yang bersifat kuantitatif belum tentu diikuti oleh efisiensi secara substantif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa efisiensi belanja berpengaruh terhadap *financial distress*. Tingginya penyerapan anggaran yang tidak diimbangi dengan efektivitas terbukti dapat meningkatkan tekanan fiskal daerah [19], [26], [28]. Perbedaan hasil pada penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh efisiensi belanja sangat bergantung pada pendekatan pengukuran yang digunakan [20].

#### 3.4.3. Pengaruh Solvabilitas terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah

Hasil penelitian merepresentasikan solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Koefisien positif menunjukkan bahwa peningkatan rasio solvabilitas diikuti oleh peningkatan tingkat *financial distress*. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang kuat dalam model. Fenomena empiris di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal akibat meningkatnya kewajiban keuangan. Kewajiban tersebut dapat berupa utang maupun kewajiban jangka pendek seperti tunda bayar yang berdampak pada kondisi keuangan daerah [21]. Kondisi ini mencerminkan adanya beban fiskal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Solvabilitas secara konseptual menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangannya. Tingkat solvabilitas yang tinggi menunjukkan besarnya proporsi kewajiban dibandingkan dengan kapasitas keuangan yang [29].

Kondisi tersebut dapat mengurangi ruang fiskal dalam pengelolaan anggaran daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan kewajiban keuangan dapat meningkatkan risiko tekanan fiskal. Beban kewajiban yang tinggi berpotensi mengurangi fleksibilitas anggaran dan meningkatkan risiko ketidakseimbangan keuangan [16]. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara solvabilitas dan *financial distress*.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu, yaitu menemukan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Peningkatan kewajiban keuangan terbukti dapat meningkatkan risiko tekanan fiskal daerah [20]. Perbedaan hasil pada penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh solvabilitas dapat dipengaruhi oleh kondisi fiskal dan karakteristik daerah yang berbeda [28].

## 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi *financial distress* pemerintah daerah dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik pengelolaan keuangan antar daerah, di mana kemandirian keuangan berkaitan dengan kemampuan menekan tekanan fiskal, sedangkan efisiensi belanja dan solvabilitas berkaitan dengan peningkatan tekanan keuangan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas pendapatan asli daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan belanja perlu diarahkan tidak hanya pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran, serta diimbangi dengan pengendalian kewajiban keuangan untuk menjaga keseimbangan fiskal. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan variabel lain dengan mengombinasikan faktor keuangan dan non-keuangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

## Daftar Rujukan

- [1] Sony, E., Alya'Labibah, H., Mangar, I., Hariri, A., Fernando, Z. J., Yamani, M., ... & Rahaor, F. M. B. (2025). *Hukum Pemerintahan Desa dan Desa Adat di Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- [2] Dina, F., Mirosea, N., Hariani, S., Wahyuningsih, P., Susanto, H., Ramadhaniyah, R., Sulastris, R., Yulastina, M., Adnyana, I. D. G. A. J., Rosita, R., Prayudi, M. A., Jatmika, W., & Ramadhani, M. H. Z. K. (2025). *Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Isu Riset*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- [3] Mustanir, A. (2022). *Pelayanan publik*. Penerbit Qiara Media.
- [4] Herlin, F., Rosita, R., & Basri, H. (2021). *Keuangan daerah*. CV Azka Pustaka.
- [5] Hartoto, H., Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, S., Aprilia, R., Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025).

- Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori dan Praktik)*. Bandung: Widina Media Utama.
- [6] Yanti, E. (2025). Pemprov Sultra Defisit Anggaran Rp 777 Miliar, Utang Rp 757 Miliar Termasuk Dana PEN untuk Jalan Toronipa dan RS Jantung. Telisik Indonesia. Retrieved from <https://telisik.id/news/pemprov-sultra-defisit-anggaran-rp-777-miliar-utang-rp-757-miliar-termasuk-dana-pen-untuk-jalan-toronipa-dan-rs-jantung>
- [7] Annisa, F. U. (2025). Soal Utang Pemprov Lampung Rp1,8 Triliun, Marindo: Kita Tidak Boleh Bicara Salah Siapa. Rmollampung. Retrieved from <https://rmollampung.id/soal-utang-pemprov-lampung-rp18-triliun-marindo-kita-tidak-boleh-bicara-salah-siapa>
- [8] Syafrudin, A. (2025). APBD Kalteng 2024 Defisit 80,18 Persen, Pemprov Akan Genjot PAD agar Tak Bergantung Dana Transfer Pusat. Beritasampit.Com. Retrieved from <https://beritasampit.com/2025/06/20/apbd-kalteng-2024-defisit-8018-persen-pemprov-akan-genjot-pad-agar-tak-bergantung-dana-transfer-pusat/>
- [9] Riau Televisi. (2025). Defisit APBD Riau 2024 Rp1,76 Triliun, DPRD Didesak Tak Diam. Riautelevisi.Com. Retrieved from <https://www.riautelevisi.com/berita-defisit-apbd-riau-2024-rp176-triliun-dprd-didesak-tak-diam.html>
- [10] Suryantini, N. P. S., Arsawan, I. W. E., Mahanavami, G. A., Amrita, N. D. A., & Parwita, G. B. S. (2025). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. CV. Intelektual Manifes Media.
- [11] Winarna, J. (2024). *Informasi Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- [12] Sucahyo, U. S., Mahastanti, L. A., Damayanti, T. W., & Supramono, S. (2023). *Badan Usaha Milik Daerah dalam Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- [13] Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiaty, N. A. (2021). *Keuangan di era otonomi daerah*. Penerbit Andi.
- [14] Fikri, M. A., & Christian, A. R. (2021). *Pengantar Bisnis*. UAD PRESS.
- [15] Satrianto, A. (2024). *Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- [16] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- [17] Suroso, S. (2022). *Good Corporate Governance*. Penerbit Qiara Media.
- [18] Zakia, R., & Setiawan, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Financial Distress (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(3), 653–671. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.387>
- [19] Pradana, I., & Sarjiyanto, S. (2023). Financial Distress Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 978–985. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/business/article/view/442>
- [20] Azzura, M., Dewata, E., & Frymaruwah, E. (2025). Factors Influencing Financial Distress in Regency/City in South Sumatra Province. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 10(1), 232–243. <https://doi.org/10.29303/jaa.v10i1.687>
- [21] DJPb Papua Barat. (2023). *Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat*.
- [22] Astuti, T. D., Pabulo, A. M. A., Tombo, J. B., Rizqullah, D., Leu, Y. D. S. B., Amiruddin, A. D. M. P., & Utami, D. T. (2024). *Pengauditan: Teori dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [23] Islamiyah, M. T., Ratifah, I., & Firdaus, F. (2022). Do Financial Ratio Predicting Financial Distress in Local Government. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 15(1), 56–60. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v15i01.4797>
- [24] Ali, I. N., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Kemandirian Daerah dan Level of Capital Outlay terhadap Financial Distress: Studi Empiris pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Periode 2019-2023. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7(2), 736–748. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i2.2630>
- [25] Elfhyana, E., & Arza, F. I. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Faktor Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(2), 425–437. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.500>
- [26] Ningrum, D. T., & Sholihah, R. A. (2022). The Influence of Financial Factors and Local Government Characteristic on Financial Distress. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi dan Bisnis*, 5(1), 98–112. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.226>
- [27] Aryansyah, A. F., Basri, M. H., Wardhani, R. S., Wibawa, D. P., Noviyanti, I., Sari, W. F., ... & Waradhika, N. (2025). *Dasar-dasar teori inflasi: Dari pemikiran klasik hingga Keynesian*. Penerbit Widina.
- [28] Rahmatika, N. A., & Imron, M. (2022). Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, Level of Capital Outlay terhadap Financial Distress pada saat Pandemi Covid-19 melalui Jumlah Penduduk sebagai Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 437–444. <https://doi.org/10.34308/eqjen.v10i1.554>
- [29] Ridwan, R., Asbaruna, L. W. B., Nugroho, T. C., Kurniawati, S. B., Malik, R. A., Hartinah, S., Said, S. N. R., Rahman, A. N. M., Haryani, H., Hendrawan, A., Warseno, W., Saffanah, N., Husni, M., Surachman, A. E., Syachbrani, W., Fadli, S., Setiawan, R., Yusuf, Z., Siahaan, M., ... Lisnawati, L. (2025). *Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.